

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan *output* perkapita yang berlangsung terus menerus dalam jangka panjang (Sukirno, 1996). Pertumbuhan ekonomi diartikan juga sebagai kenaikan jangka panjang kemampuan suatu negara dalam meningkatkan ketersediaan barang-barang ekonomi penduduknya (Kuznets dalam Jhingan, 2001). Kemampuan ini tumbuh mengikuti kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukannya. Kondisi ini merupakan satu indikator pertumbuhan ekonomi. Kondisi daerah yang secara geografis dan sumber alam yang berbeda, menimbulkan kondisi ada daerah yang lebih makmur dan lebih maju dibandingkan daerah lain. Oleh karena itu kebijakan pembangunan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada sesuai dengan kondisi perbedaan masing-masing daerah. Proses tersebut dilakukan agar pembangunan terlaksana secara lebih merata. Sehubungan dengan hal ini diharapkan perhatian pemerintah harus tertuju pada semua daerah tanpa ada perlakuan khusus. Kondisi inilah kemudian yang menegaskan bahwa sumberdaya manusia yang efektif menjadi prasyarat utama bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Sulistiyowati, 2011). Kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja memiliki

keterkaitan. Kesempatan kerja memiliki, dimaknai sebagai jumlah penduduk yang bekerja, serta menggambarkan peran masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Semakin besar kuantitas serta semakin tinggi kualitas sumberdaya yang ada, maka semakin besar pula potensi suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhannya (Tanjung, 2013). Namun demikian, kenyataannya hasil pembangunan terkadang masih dirasakan belum merata dan mengalami kesenjangan antar daerah (Wicaksono, 2010). Pertumbuhan ekonomi diartikan juga sebagai kenaikan *output agregat* (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan perekonomian) atau Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai total seluruh *output* akhir yang dihasilkan suatu kegiatan perekonomian, baik yang dilakukan warga lokal (WNI) maupun warga asing (WNA) yang bermukim atau menetap di negara bersangkutan. Ukuran umum yang sering digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDB untuk skala nasional atau persentase perubahan PDRB untuk skala provinsi atau kabupaten/kota. Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. PDB mengukur aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan

proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan (Masli, 2012). Dalam hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Kemampuan suatu negara dalam mengembangkan potensi sumber daya merupakan proses pertumbuhan ekonomi. Semakin besar kuantitas serta sesemakin tinggi kualitas sumber daya yang ada, maka semakin besar pula potensi suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhannya (Tanjung, 2013)..

Masalah perekonomian makro Indonesia yang selalu menjadi sorotan adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah ekonomi yang harus segera di atasi dan diselesaikan. Meski tidak mungkin untuk dihilangkan tetapi paling tidak dapat dikurangi jumlahnya. Salah satu tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan diantaranya dengan pembangunan ekonomi. Berbagai kegiatan pembangunan ekonomi dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satunya dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan pada daerah yang relatif memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam penurunan jumlah miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini

berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin (Simatupang, 2003). Kemiskinan merupakan masalah klasik yang belum tuntas diselesaikan terutama di Negara berkembang. Khusus di daerah pedesaan, kemiskinan sering kali menjadi penyebab terjadinya urbanisasi yang menyebabkan terjadinya regional disparity. Oleh karena itu, pedesaan haruslah ditangani secara lebih serius agar kesejahteraan masyarakatnya dapat ditingkatkan. Pada hakekatnya, kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara sedang berkembang (NSB), tidak terkecuali di Indonesia (Tambunan: 2003). Karenanya, tidaklah mengherankan ketimpangan itu pastinya selalu ada, baik itu di negara miskin, negara sedang berkembang, bahkan negara maju sekalipun. Hanya saja yang membedakan dari semua itu adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing negara tersebut.

Pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non-makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Untuk saat ini konsep kemiskinan yang digunakan oleh BPS adalah konsep ekonomi, dimana kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar. Pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar versi BPS ini sejalan dalam buku "The

End of Poverty” (Sachs, 2005) yang menjelaskan bentuk kemiskinan ini sebagai “the extreme poverty”. Menurutnya, bentuk kemiskinan dalam konteks ini merupakan ketidakmampuan seseorang, suatu keluarga, atau sekelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baik itu dalam soal pangan maupun non pangan.

Kemiskinan biasanya didefinisikan sebagai kondisi posisi individu yang berada di bawah tingkat standar hidup minimal yang dapat diterima masyarakat. Para ahli membuat pengertian kemiskinan dengan berbagai versi. Dapat berupa gambaran kekurangan dari sisi materi, kurangnya kebutuhan sosial, pendapatan, akses terhadap sumber-sumber tertentu dan lainnya (Maipita, 2014). Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan (Badan Pusat Staistik). Kondisi masyarakat yang hidup dalam kungkungan kemiskinan pada umumnya menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai (Jonaidi,2012). Kemiskinan sudah sejak lama menjadi persoalan bangsa. Sekarangpun masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Persoalan itu masih terus dipikirkan dan ditemukan solusinya. Perubahan keadaan membuat masalah menjadi lebih kompleks sehingga membahas merupakan termasuk hal yang prioritas saat ini.

produktivitas. Pembangunan ekonomi memberi kesempatan kepada masyarakat memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitar. Selain itu dapat juga mempertinggi tingkat kebebasan masyarakat dalam melakukan tindakan tertentu. Kegiatan investasi seperti penanaman modal dalam negeri atau asing diharapkan akan meningkat dengan pembangunan ekonomi. Investasi yang berlangsung di suatu daerah akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan investasi dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Investasi memungkinkan masyarakat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang sebelumnya pengangguran akan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan dengan adanya kegiatan investasi (Sumanto dalam Royan,dkk, 2015).

Seiring dengan meningkatnya pendapatan, daya beli masyarakat yang merupakan bagian dari komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga akan meningkat. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2004). Jumlah tenaga kerja yang lebih besar akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan yang lebih besar akan memperbesar ukuran pasar domestiknya (Todaro, 2000). Kondisi seperti ini memungkinkan terjadi jika tenaga kerja produktif dapat terserap pada kesempatan kerja yang tersedia. Namun jika tenaga kerja ini tidak terserap akan memunculkan masalah, terutama apabila pertumbuhan tenaga kerja jauh melebihi kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi ini akan menciptakan pengangguran.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ekonomi dalam rangka mensejahterakan masyarakat adalah pendidikan. Oleh karena itu pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Proses belajar mengajar yang berlangsung menyiapkan individu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Setiap warga negara berhak memperoleh ilmu pengetahuan pada tahap manapun dalam kehidupannya. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 Bab III pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Suyatno, Sumedi, dan Riadi (2009:361) menjelaskan bahwa ada berbagai alasan mengapa pemerintah memprioritaskan bidang pendidikan khususnya meningkatkan profesionalisme guru yaitu antara lain: 1) dikarenakan bidang pendidikan sangat strategis dan menentukan maju mundurnya sebuah bangsa, 2) dikarenakan abad ke-21 merupakan era industri *modern*, menempatkan *human capital* sebagai basis dalam memenuhi berbagai kebutuhan, baik individu maupun kelompok (masyarakat, bangsa dan negara), 3) dikarenakan tuntutan mutu dan relevansi yang artinya perguruan tinggi tanpa terkecuali, lembaga pendidikan guru, dituntut untuk menghasilkan mutu lulusan yang handal dan profesional sehingga para lulusannya dapat mengarungi kehidupannya yang terus berubah.

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sudah melakukan upaya-upaya untuk peningkatan mutu pendidikan khususnya di bidang pendid meliputi SD/ sederajat, SLTP/ sederajat, 2) Pendidikan lanjut. Namun sekarang bagaimana guru menyerap ilmu yang didapat dari pelatihan atau fasilitas yang di sediakan pemerintah untuk mengembangkan kompetensi dari guru itu yang terpenting. Dari upaya-upaya pemerintah tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme guru dimasa yang akan datang. Menurut Basrowi (2010) pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia unuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Sementara menurut Muliani (2009) perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

Tingkat pendidikan menurut notoatmodjo (2003) dapat dibedakan berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu seperti antara lain: 1) Pendidikan dasar awal selama 9 tahun,.Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah baik dalam lingkup provinsi maupun kabupaten dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan memberikan suatu gambaran kondisi tingkat kemampuan daerah dalam mengelola, memanfaatkan serta memaksimalkan sumber daya yang ada pada daerah terkait. Kegiatan pembangunan nasional tidak dapat lepas dari peran-peran tiap-tiap daerah dalam mensuksekan pemerintahan daerah di daerah-daerahnya. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada pada masing-masing daerah

tersebut. Selain itu, sebagai upaya meningkatkan peran dan kemampuan daerah dalam pembangunan nasional, maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasionalnya terutama dalam era otonomi luas sekarang ini.

Berhasilnya suatu pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator perekonomian. Satu indikatornya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pembangunan suatu negara. Secara tradisional, pembangunan memiliki arti peningkatan PDRB secara terus menerus. Pembangunan suatu negara yang baik juga harus diikuti pembangunan ekonomi yang baik juga. Hal ini bisa dilihat dari periode ke periode lainnya bahwa kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya.

Pada hakekatnya pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan pada tiga fondasi dalam pembangunan yakni pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Ketiganya memiliki peran yang sangat penting didalam proses pembangunan. Sebagai salah satu dari bagian pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, pembangunan ekonomi di Serdang Bedagai juga berperan penting terhadap sukses tidaknya atau keberhasilan pembangunan ekonomi tingkat nasional secara keseluruhan. Masing-masing kabupaten di Indonesia termasuk juga Kabupaten Serdang Bedagai harus mampu menghadapi tantangan perekonomian global yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan yang

terjadi terutama dalam era kini dimana masing-masing daerah diberikan hak kebebasan seluas-luasnya untuk mengelola kekayaan daerah yang dimiliki dan memanfaatkannya dengan optimal untuk kegiatan pembangunan di daerah tersebut yang sudah dilegalkan dalam bentuk undang-undang yang jelas mengenai otonomi daerah, sehingga menjadi mutlak tiap-tiap daerah untuk mampu bersaing antar daerah dengan semangat yang sama yakni membangun Indonesia.

Menurut Isdjoyo (dalam Maipita, 2013: 67) penyebab kemiskinan di desa antara lain:

1. Ketidakberdayaan. Kondisi ini muncul karena kurangnya lapangan kerja, rendahnya harga produk yang dihasilkan mereka, dan tingginya biaya pendidikan.
2. Keterkucilan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keahlian, sulitnya transportasi, serta ketiadaan akses terhadap kredit menyebabkan mereka terkucil dan menjadi miskin.
3. Kemiskinan materi, kondisi ini diakibatkan kurangnya modal, dan minimnya lahan pertanian yang dimiliki menyebabkan penghasilan mereka relative rendah.
4. Kerentanan, sulitnya mendapatkan pekerjaan, pekerjaan musiman, dan bencana alam, membuat mereka menjadi rentan dan miskin.
5. Sikap. Sikap yang menerima apa adanya dan kurangnya termotivasi untuk bekerja keras membuat mereka menjadi miskin.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai diukur dari data PDRB harga konstan yang menjelaskan suatu daerah untuk menaikkan atau menciptakan nilai tambah (*output*) pada suatu waktu tertentu. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah pada skala daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Secara umum, pengeluaran rutin ataupun pengeluaran pembangunan mengalami kondisi yang terus bertambah dari tahun ketahun anggaran daerah tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap tahun kebutuhan untuk pembangunan sangatlah besar. Pembahasan mengenai pengeluaran pemerintah ini cukup menarik para peneliti disebabkan banyaknya teori-teori yang dapat dijadikan acuan dalam pembahasannya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari kemajuan ekonomi suatu negara. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya (Todaro, 2000). Pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena yang penting bagi suatu bangsa, masalah pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan bangsa agar dapat pula meningkatkan pembangunan nasional yang dapat meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional (Sukirno, 2003).

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan

meningkat disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah, yaitu Produk Nasional Bruto riil atau *Product Domestic Bruto riil*. (Sukirno, 2006).

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan rujukan bagi pembangunan daerah atau dapat dikatakan dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu konsep pembangunan ekonomi yang disusun atau direncanakan oleh pemerintah pusat dijabarkan dalam rencana pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi di Indonesia mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan nasional. Meningkatnya pendapatan nasional diharapkan akan meningkatkan kesempatan kerja. Dengan kemajuan pembangunan ekonomi yang telah dicapai oleh Indonesia, maka diharapkan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Suindyah, 2011).

Keberhasilan Pembangunan dapat ditunjukkan salah satunya dari peningkatan Pertumbuhan Produk domestik regional bruto. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2002-2019 mengalami fluktuasi Terlihat pada tabel 1.1. berikut ini.

Tabel. 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2002 – 2019 (%).

Tahun	PE
2002	2.79
2003	3.04
2004	6.05
2005	5.91
2006	6.22
2007	6.25
2008	6.12
2009	5.92
2010	6.07
2011	6.06
2012	6.09
2013	5.8
2014	5.12
2015	5.06
2016	5.41
2017	5.16
2018	5.17
2019	5.28

Sumber: BPS, (diolah)

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai selama tahun 2002 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuatif, sebagai berikut tahun 2002 sebesar 2.79 dan perlahan naik ditahun 2013 menjadi 3.04 dan melaju naik kembali pada tahun 2004 menjadi 6.05 dan terus bertahan sampai tahun 2012 menjadi 6.07, namun tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 5.8 dan terus mengalami penurunan hingga 2019 menjadi 5.28. Ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Serdang Bedagai masih lambat dapat dilihat dari tabel 1.1. terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami naik turun diiringi dengan jumlah penduduk miskin yang juga mengalami naik turun. Artinya

bahwa secara tidak langsung keresahan ekonomi akan berdampak pada jumlah penduduk miskin di Kabupaten Serdang Bedagai.

Menurut Gemmell, (1994) orang dengan pendidikan lebih tinggi harus memperoleh pendapatan tahunan yang lebih besar. Hal ini tidak dapat dipungkiri, dengan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan dalam masyarakat dan juga dapat menyempurnakan alih teknologi. (Dowling, Valenzuela, 2004).

Bidang pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia pada modal manusia yang dianggap sebagai sumbangan terbesar bagi ekonomi negara. Dampak pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu memberikan perkembangan kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, keterampilan, keahlian kemampuan dan wawasan mereka agar mampu bekerja lebih produktif baik secara perorangan maupun kelompok. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan diperlukan hasrat masyarakat untuk meningkatkan pendidikan formal melalui proses belajar di sekolah.

Pendidikan yang tinggi akan membentuk angkatan kerja yang produktif, karena akan meningkatkan keahlian tenaga kerja yang pada akhirnya akan mempengaruhi output suatu daerah (Harbison, dalam Jhingan 2004). Dengan kemampuan SDM yang tinggi diharapkan dapat menciptakan lapangan usaha sendiri serta tidak tergantung kepada pihak lain dalam memperoleh pekerjaan. Namun demikian ketidaksesuaian antara capaian pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha menyebabkan banyak tenaga kerja yang terpaksa menganggur dan

berada pada posisi mencari pekerjaan. Hal tersebut menjadikan pertanyaan di satu apakah pemerintah sudah cukup menyediakan pendidikan bagi masyarakatnya untuk memperoleh capaian pendidikan yang tinggi sehingga mampu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, disisi lain masyarakat sendiri apakah sudah memanfaatkan infrastruktur pendidikan yang ada.

Capaian pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai untuk jumlah lulusan SMA dapat dilihat dalam tabel 1.2

Tabel 1.2. Tingkat Pendidikan SMA di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2002 – 2019 (jiwa).

Tahun	TP
2002	6.766
2003	6.912
2004	6.914
2005	8.477
2006	8.320
2007	8.324
2008	9.272
2009	9.675
2010	9.546
2011	9.989
2012	8.976
2013	7.942
2014	10.703
2015	18.180
2016	10.802
2017	6.587
2018	5.314
2019	6.675

Sumber: BPS, (diolah)

Dari tabel 1.2 juga memperlihatkan trend dari jumlah lulusan SMA mengarah pada 18 tahun terakhir, Rata-rata angka partisipasi murni dari setiap jenjang pendidikan memperlihatkan keadaan yang sama dengan keadaan angkatan

kerja dan jumlah murid, dimana rata-rata angka partisipasi murni setiap jenjang pendidikan SMA di Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan bahwa angka jumlah lulusan SMA pada tahun 2002 sebesar 6.766 jiwa dan tahun 2005 naik menjadi 8.320 jiwa. Sangat jauh dari target pendidikan menengah universal yang sedang digalakan oleh pemerintah yaitu diharapkan pendidikan minimal penduduk Indonesia adalah SMA. Hal tersebut dilatarbelakangi dari kecenderungan masyarakat yang hanya memenuhi program wajib belajar yang selama ini dicanangkan oleh pemerintah yaitu selama 9 tahun, sehingga pada tahun 2015 naik menjadi 18.802.

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di semua negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktifitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam mencapai tujuan pembangunan secara menyeluruh diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata.

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu wilayah yang perkembangan perekonomiannya pesat. Namun ditengah pesatnya perkembangan perekonomian yang terjadi, jumlah penduduk miskin masih sangat

tinggi. Permasalahan kemiskinan masih menjadi pokok persoalan yang harus mendapatkan perhatian ekstra. Pada kondisi saat ini, tingkat kemiskinan bukan hanya di pandang dari rendahnya kualitas ekonomi, tapi sudah di pandang dari sudut yang berbeda-beda dan tergantung pandangan yang digunakan maka batasan kemiskinan juga telah bergeser. Dalam arti yang luas kemiskinan merupakan ketidakmampuan ekonomi tidak sebatas pada belum dapat memenuhi kebutuhan dasar namun juga secara umum belum dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan (Alit dan Suidiana, 2013).

Semakin besar jumlah dan persentase penduduk miskin pada satu daerah, beban pembangunan pada daerah tersebut akan semakin besar pula. Atas dasar hal tersebut salah satu indikator berhasilnya suatu pembangunan adalah menurunnya jumlah dan persentase penduduk miskin. Peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan sangat besar untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program. Namun program-program yang dicanangkan oleh pemerintah belum mencapai hasil yang maksimal dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan bertahap dan kadang mengalami fluktuasi.

Kompleksnya masalah kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor yang menyebabkan munculnya kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi, artinya kemiskinan erat kaitannya dengan segala aspek kehidupan masyarakat sehingga upaya untuk memecahkan masalah kemiskinan tidaklah mudah. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi memberikan indikasi bahwa ada sesuatu yang perlu dicermati dan dikaji ulang atas strategi, dan

program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah. Persentase jumlah penduduk miskin dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 : Nilai Indikator Kemiskinan Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin

Tahun	JPM
2002	10.11
2003	10.45
2004	10.67
2005	9.89
2006	10.14
2007	10.77
2008	10.61
2009	9.51
2010	10.59
2011	10.07
2012	9.89
2013	9.35
2014	8.98
2015	9.59
2016	9.53
2017	9.30
2018	8.22
2019	7.90

(Sumber : BPS Kabupaten Serdang Bedagai)

Berdasarkan tabel 1.3 diketahui indikator jumlah penduduk miskin di Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan bahwa Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Serdang Bedagai selama tahun 2002 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuatif, sebagai berikut tahun 2008 sebesar 10.61 dan pada 2009 turun menjadi 8.63% dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2010 menjadi 10.59 dan pada tahun 2019 turun menjadi 7.90.

Pertumbuhan ekonomi 2002-2019 Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6.07 pada tahun 2010. Sedangkan

pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 6.06. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 6.09. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonominya menurun 5.8. Meningkat lagi pada tahun 2014 sebesar 5.12 tetapi menurun pada tahun 2015 sebesar 5.05. Di lihat dari pertumbuhan ekonomi 2002-2019 Kabupaten Serdang Bedagai dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi sebesar 6.07. Pada tahun 2011 mengalami penurunan 6.06. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 6.09. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonominya menurun 5.8. Meningkat lagi pada tahun 2014 sebesar 5.12 tetapi menurun pada tahun 2015 sebesar 5.05.

Menurut Sharp, seperti dikutip Kuncoro (2006: 120), penyebab kemiskinan dipandang dari segi ekonomi adalah akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan, Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya juga rendah, yang pada gilirannya upahnya juga rendah. Di sisi lain menurut Kartasmita (1996) kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa. Teori pertumbuhan ekonomi (Rostow) menekankan tinjauannya pada sejarah tahap tahap pertumbuhan ekonomi serta ciri dan syarat masing-masing. Berdasarkan data BPS pada september 2002 sebanyak 10.11 persen kepala rumah tangga miskin berpendidikan SD kebawah. Hal ini membuat penduduk miskin memiliki keterbatasan untuk mengembangkan diri. Akibatnya mereka tidak mampu bersaing di arena lapangan kerja yang semakin terbatas dan menuntut kualifikasi yang tinggi. Keadaan tersebut memaksa

mereka untuk menganggur atau bekerja dengan upah yang rendah sehingga penghasilan yang mereka terima tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penghasilan yang sangat minim ini pada akhirnya membawa dampak negatif seperti buruknya derajat kesehatan dan gizi yang akan mempengaruhi daya tahan fisik dan daya pikir sehingga mengurangi prakarsa dan inisiatif. Keadaan sedemikian rupa mempersulit mereka untuk dapat mengubah nasibnya menjadi lebih baik tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Hal tersebut menjadi dasar untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang “ **Pengaruh Jumlah Lulusan SMA dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Serdang Bedagai**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah jumlah lulusan SMA berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai ?
2. Apakah jumlah penduduk miskin berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai ?
3. Apakah jumlah lulusan SMA dan jumlah penduduk miskin berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis jumlah lulusan SMA terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Untuk menganalisis jumlah penduduk miskin terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Untuk menganalisis jumlah lulusan SMA dan jumlah penduduk miskin terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat :

1. Bagi penulis , sebagai media pengembangan ilmu pengetahuan dalam upaya peningkatan kualitas intelektualitas.
2. Bagi Kepala Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai, diharapkan dapat memanfaatkan informasi yang didapatkan dari penelitian ini dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi daerahnya terutama dari pengaruh jumlah lulusan SMA dan jumlah penduduk miskin terhadap pertumbuhan ekonomi.